

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang eSistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan pemerintah daerah serta undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat serta memperhatikan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten banggai nomor 20 tahun 2011 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2019. yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJMD untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategik (Renstra) OPD yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Pendapatan Kabupaten Banggai yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan..

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten banggai dibidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis pendapatan Daerah, penyelenggaraan sebagian

---

---

urusan pemerintahan, pelayanan umum dibidang pendapatan, pembinaan serta pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.

Dengan demikian sangatlah tepat pemerintah Kabupaten Banggai dalam memantapkan program kebijakan teknis bidang pendapatan daerah untuk mewujudkan program serta kegiatannya yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) tahun 2019.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
-

- 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
-

- 
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### ❖ Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Pendapatan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2019 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

#### ❖ Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten banggai dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah kabupaten banggai tahun 2019.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
-

---

**Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banggai**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2017.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Banggai.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Banggai.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019.

**Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2019
- 3.3. Program dan Kegiatan Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2018

**Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah.****Bab V Penutup**

---

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2018

#### A. Target Dan Realisasi Pengelolaan Belanja Daerah

##### a. Target dan Realisasi Belanja Langsung

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2018 Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2), untuk melihat pembiayaan selama tahun 2018 dapat di uraikan sebagai berikut :

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menganggarkan belanja langsung sebesar

Rp. 5.948.635.860,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.854.387.001,00 atau 98,42% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun**  
**Anggaran 2018**

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.598.099.750,00</b>	<b>1.549.831.436,00</b>	<b>96,98</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.000.000,00	105.534.063,00	74,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.537.750,00	31.537.750,00	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.784.000,00	60.784.000,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.837.000,00	19.837.000,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.641.000,00	7.641.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	3.280.000,00	68,33

	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	544.000.000,00	543.757.623,00	99,96
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	168.000.000,00	167.960.000,00	99,98
	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	582.000.000,00	571.000.000,00	98,11
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>600,492,500,00</b>	<b>588.809.700,00</b>	<b>98,05</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	71.500.00,00	71.500.00,00	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.008.300,00	23.895.000,00	99,53
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	398.504.200,00	394.934.700,00	99,10
	Pengadaan Meubelair	41.870.000,00	41.870.000,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas/Operasional	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.750.000,00	9.750.000,00	54,93
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00



<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>230.058.000,00</b>	<b>230.058.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	147.396.000,00	147.396.000,00	100,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	82.662.000,00	82.662.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	4.339.000,00	4.339.000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>35.801.000,00</b>	<b>35.801.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	11.801.000,00	11.801.000,00	100,00
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>106.055.500,00</b>	<b>106.004.500,00</b>	<b>99,95</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.038.500,00	21.038.500,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	19.970.000,00	19.970.000,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	18.498.000,00	18.447.000,00	99,72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	46.549.000,00	46.549.000,00	100,00
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Sistem</b>	<b>34.938.000,00</b>	<b>34.835.000,00</b>	<b>99,71</b>

	<b>Informasi / Data</b>			
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	9.668.000,00	9.668.000,00	100,00
	Pemutakhiran Data Pegawai	25.250.000,00	25.147.000,00	99,59
<b>15</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.276.225.110,00</b>	<b>3.242.386.365,00</b>	<b>98,97</b>
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	66.500.000,00	62.832.000,00	94,48
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	234.123.000,00	233.775.500,00	99,95
	Pemutakhiran Data, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	212.036.000,00	209.401.000,00	98,76
	Penagihan Uji Petik dan Penagihan PBB	254.170.000,00	253.649.000,00	99,80
	Pengawasan dan Pelaksanaan Barang Quasi	116.740.000,00	105.400.000,00	90,29
	Penagihan Pajak Daerah	277.365.360,00	272.894.500,00	98,39
	Sosialisasi Pajak Daerah	42.709.000,00	42.709.000,00	100,00
	Analisis Potensi Retribusi Daerah	0	0	0
	Intensifikasi dan Eksentifikasi Retribusi Daerah	58.500.000,00	58.340.000,00	99,73
	Penilaian Objek PBB-P2	405.250.000,00	403.183.000,00	99,49

	Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain-lain Pendapatan	81.311.500,00	81.311.500,00	100,00
	Pengawasan Lapangan Spanduk dan Reklame se-Kabupaten Banggai	40.835.000,00	39.935.000,00	97.80
	Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun N+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N-1 dan Tahun N	2.637.000,00	2.637.000,00	100,00
	Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB	68.625.000,00	68.625.000,00	100,00
	Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	435.476.000,00	431.441.000,00	99.07
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber PBB	83.510.000,00	83.367.000,00	99.83
	Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB	36.670.000,00	36.609.000,00	99.93
	Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan	184.986.250,00	183.908.200,00	99.42
	Rapat Kordinasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan	8.000.000,00	7.194.000,00	89.93
	Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00

	Kordinasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	25.761.800,00	25.461.800,00	98.84
	Sosialisasi Penyelesaian Retribusi Daerah	111.043.000,00	111.043.000,00	100 ,00
	Koordinasi dan Optimalisasi Dana Transfer/Perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi	194.502.300,00	194.587.266,00	99.99
	Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Lain-lain	11.440.000,00	11.440.000,00	100 ,00
	Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	96.483.600,00	96.420.300,00	99.93
	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	97.679.800,00	97.304.800,00	99.62
	Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan Provinsi	72.073.500,00	71.568.500,00	99.30
	Monitoring dan Pengendalian PAD	52.027.000,00	51.679.000,00	99.33
	Penyelesaian Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	3.325.000,00	3.325.000,00	100 ,00
<b>16</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota</b>	<b>62.627.000q,00</b>	<b>62.322.000,00</b>	<b>99,51</b>
	Pembinaan Petugas Pemungut PAD-PBB, KUPT, Petugas Pemungutan	35.972.000,00	35.883.000,00	99.88
	Monitoring dan Pengendalian PBB	26.700.000,00	26.439.000,00	99.02

---

**B. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 5.948.635.860.00,- yang terealisasi sebesar Rp. 5.854.387.001.00,- atau 96,98 %.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan menyediakan kebutuhan kantor dalam memaksimalkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 12 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.598.099.750.00 realisasi sebesar Rp. 1.549.831.436.00 atau 96,98 %, sisa Rp. 48.268.314 ini dikarenakan beberapa kegiatan seperti :

- Penyediaan Jasa surat menyurat, untuk pembelian materai dengan jumlah dana Rp. 8.400.00.00 realisasi Rp. 8.400.00.00 atau 100 %.
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional, untuk pembayaran Pajak dan STNK Roda Dua dan Roda Empat, dengan jumlah dana sebesar 11.300.000,- dan terealisasi Rp. 11.300.000 atau 100%.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah dana Rp. 141.000.000.00 realisasi Rp. 105.534.063.00 atau 98,57 % sisa 35.465.937.00. Serapan Anggaran tidak mencapai 100% disebabkan karena sisa dari pembayaran belanja listrik dan internet, listrik dan telepon terjadi efisiensi.
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, diperuntukan dalam pembelian peralatan untuk kebersihan kantor, dengan jumlah dana Rp. 31.537.750,00 atau 100 %.
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor, diperuntukan pembelian Alat tulis kantor untuk kebutuhan operasional dan pelayanan, dengan jumlah anggaran Rp. 60.784.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.784.000,- atau 100%.
-

- 
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk lembar disposisi dan cetak serta foto copy dokumen pendukung pelayanan Rutin dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.837.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 19.837.000,- atau 100%
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, untuk kebutuhan penggantian komponen listrik di kantor yang rusak, dengan jumlah dana Rp. 7.641.000,- dan telah di realisasikan sebesar Rp. 7.641.000,- atau 100%
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan jumlah dana Rp. 4.800.000.00 realisasi Rp. 3.280.000.00 atau 68,33 % sisa 1.520.000.00. Serapan Anggaran tidak mencapai 100% disebabkan sisa dari pembayaran koran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan.
  - Penyediaan Makanan dan Minuman untuk kebutuhan makanan dan minuman rapat-rapat dengan jumlah dana Rp. 18.800.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.800.000,- atau 100%.
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan jumlah dana Rp. 544.000.000.00 realisasi Rp. 543.757.623.00 atau 99,96 % sisa 242.377.00. sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan jumlah dana Rp. 168.000.000.00 realisasi Rp. 167.960.00.00 atau 99,98 % sisa 40.000.00, sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Penyediaan tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran dengan jumlah dana Rp. 582.000.000.00 realisasi Rp. 571.000.000.00 atau 98,11 % sisa 11.000.00, terjadi pada pembayaran biaya
-

---

honorarium non PNS dimana terdapat beberapa honorarium Non PNS berhenti.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang bertujuan untuk penyediaan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 8 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 600.492.500.00 realisasi sebesar Rp. 588.809.700.00 atau 98,05 %, sisa Rp. 11.682.800.00, ini dikarenakan beberapa kegiatan seperti :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang dibelanjakan untuk pengadaan kendaraan Roda Dua bagi pejabat eselon IV , dengan jumlah dana 71.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.500.000,- atau 100%
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor, yang dibelanjakan untuk AC, mesin potong rumput, mesin absensi dan mesin Tik, denagndana sebesar Rp. 24.008.300.00 realisasi Rp. 23.895.000.00 atau 99,53 % sisa 113.300.00, dari pembayaran belanja perlengkapan gedung kantor (mesin absensi) karena pembayarannya sesuai dengan harga penawaran.
  - Pengadaan peralatan gedung kantor, untuk belanja Note Book, Tapping Box (Cash Register), Printer dan Hard Disk dengan jumlah dana Rp. 398.504.200.00 realisasi Rp. 394.934.700.00 atau 99,10 % sisa 3.569.500.00, dari pembayaran belanja peralatan gedung kantor (komputer dan mesin tapping box) yang pembayarannya sesuai dengan harga penawaran.
  - Pengadaan Mebeleur, untuk belanja meja biro eselon IV, Meja Staf, kursi Eselon IV dan III serta kursi rapat, dengan jumlah dana Rp. 41.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41,870.000,- atau 100%.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaional, untuk biaya servise kendaraan kantor Roda Dua dan Roda Empat dengan
-

- 
- jumlah dana 38.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.500.000,- atau 100%.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, untuk pemeliharaan AC kantor, dengan jumlah dana Rp. 3.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.360.000,- atau 100%.
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, untuk servise komputer, Printer dan Server dengan jumlah dana Rp. 17.750.000.00 realisasi Rp. 9.750.000.00 atau 54,93 % sisa 8.000.000.00, dari anggaran belanja pemeliharaan server yang tidak dilaksanakan karena server masih dalam kondisi baik.
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, untuk perbaikan jaringan/instalasi listrik Kantor, dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang ditujukan membentuk disiplin aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam pelayanan pendapatan daerah dengan Jumlah Dana Rp. 230.058.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.058.000,- atau 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya diperuntukan belanja pakaian dinas harian Kheki beserta atributnya dengan jumlah dana sebesar Rp. 147.396.000,- dan telah direalisasikan Rp. 147.396.000,- atau sebesar 100%.
  - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu, diperuntukan belanja pembelian pakaian olahraga dan sepatu dengan jumlah dana Rp. 82.662.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 82.662.000,- atau 100%.
- d. Program Fasilitasi Pindah Purna, yang bertujuan untuk memfasilitasi ASN yang telah Pindah atau Purna Tugas dengan jumlah Dana Rp. 4.339.000,- dan terealisasi sebesar 4.339.000,- atau 100%. Pada Program ini terdiri dari kegiatan;
-



- 
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun, diperuntukan bagi 1 orang pegawai / ASN yang telah purna tugas dengan jumlah dana Rp. 4.339.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.339.000,- atau 100%.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur, agar setiap ASN lebih memahami tugas pokok dan fungsinya serta menguasai regulasi, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai SOP, dengan jumlah dana RP. 35.801.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.801.000,- atau sebesar 100%, Program ini terdiri dari kegiatan;
- Pendidikan dan pelatihan formal, untuk pelatihan/bintek ASN dengan jumlah dana Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 100%.
  - Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur, ditujukan bagi pembinaan pegawai/ASN dengan jumlah dana Rp. 11.801.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.801.000,- atau 100%.
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, bertujuan untuk pelaporan realisasi keuangan dan fisik serta evaluasi program dan kegiatan, terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 106.055.500.00 realisasi sebesar Rp. 106.004.500.00 atau 99,95 %, ini dikarenakan beberapa kegiatan seperti :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, bertujuan untuk mengukur capaian realisasi keuangan, fisik dan Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan jumlah dana sebesar Rp. 21.038.500,- dan telah direalisasikan sebesar 21.038.500,- atau 100%.
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang bertujuan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dengan jumlah dana Rp. 19.970.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.970.000,0- atau 100%.
-

- 
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang diperuntukan bagi pembuatan laporan keuangan akhir tahun dengan jumlah dana Rp. 18.498.000.00 realisasi Rp. 18.447.000.00 atau 99,72 % sisa 51.000.00, disebabkan sisa dari pembayaran belanja alat tulis kantor yang dibayarkan sesuai kebutuhan.
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD, yang ditujukan untuk penyusunan dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, RKPA dan DPPA dengan jumlah dana 46.549.000,- dan telah direalisasikan sebesar 46.549.000,- atau sebesar 100%.
- g. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data yang ditujukan untuk penyusunan profile SKPD dan pemutahiran data kepegawaian yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 34.938.000.00 realisasi sebesar Rp. 34.835.000.00 atau 99,71 %. Program ini terdiri dari 2 kegiatan;
- Penyusunan Profile Perangkat Daerah yang bertujuan untuk membuat dukumen profile Badan Pendapatan Daerah, dengan jumlah dana Rp. 9.688.000,- dan telah terealisasi sebesar 9.688.000,- atau 100%.
  - Pemutakhiran data kepegawaian, yang bertujuan untuk pengawasan data kepegawaian Bapenda, dengan jumlah dana Rp. 25.250.000.00 realisasi Rp. 25.147.000.00 atau 99,59 % sisa 103.000.00, disebabkan sisa dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
- h. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan potensi pajak Daerah. Sasaran Program ini adalah para wajib Pajak, terdiri dari 29 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.276.225.110.00
-

---

realisasi sebesar Rp. 3.242.386.365.00 atau 98,97 %. Program ini terdiri dari berapa kegiatan;

- Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang bertujuan untuk menyusun raperda dan raperbub tentang pajak dan retribusi daerah. Sasarannya adalah Raperda dan Raperbub, dengan jumlah dana Rp. 66.500.000.00 realisasi Rp. 62.832.000.00 atau 94,48 % sisa 3.668.000.00 disebabkan dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk menggali potensi sumber - sumber pajak daerah. Sasarannya adalah potensi sumber pajak asli daerah dengan jumlah dana Rp. 234.123.000.00 realisasi Rp. 191.385.000.00 atau 81,75 % sisa 42.737.900.00, disebabkan dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Pemutakhiran Data, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, yang bertujuan untuk validasi data dalam penetapan pajak daerah. Sasarannya adalah wajib Pajak Daerah, dengan jumlah dana Rp. 212.036.000.00 realisasi Rp. 186.227.500.00 atau 87,83 % sisa 25.808.500.00, disebabkan dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Penagihan uji petik dan penagihan PBB yang bertujuan untuk melakukan Uji petik dan penagihan pajak kepada wajib pajak. Sasarannya adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan, dengan jumlah
-

- 
- dana Rp. 254.170.000.00 realisasi Rp. 253.649.000.00 atau 99,80 % sisa 521.000.00,-. Serapan anggaran tidak mencapai 100% disebabkan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
- Pengawasan dan pelaksanaan barang Quasi, yang bertujuan untuk pengawasan Realisasi Retribusi, sasarannya adalah OPD Teknis pengelola Retribusi di semua kecamatan, dengan jumlah dana Rp. 116.740.000.00 realisasi Rp. 105.400.000.00 atau 90,29 % sisa 11.340.000.00, sisa dari belanja cetak karcis Rp. 11.250.000, hal ini disebabkan anggaranyang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan sisa dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.000 . disebabkan sisa dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Penagihan Pajak Daerah, yang bertujuan untuk melakukan uji petik dan penagihan pajak Daerah. Sasarannya adalah 8 (delapan) jenis Pajak Daerah, dengan jumlah dana Rp. 277.365.360.00 realisasi Rp. 251.854.500.00 atau 90,80 % sisa 25.510.860.00, disebabkan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Sosialisasi Pajak Daerah, yang bertujuan untuk menyosialisasikan perda dan perbub tentang pajak daerah. Sasarannya adalah para Wajib Pajak, dengan jumlah dana Rp. 42.709.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.709.000,- atau 100%.
-

- 
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah, bertujuan untuk menggali potensi sumber-sumber retribusi daerah. Sasarannya adalah para wajib retribusi, dengan jumlah dana Rp. 58.500.000.00 realisasi Rp. 55.490.000.00 atau 94,85 % sisa 3.010.000.00, Serapan anggaran tidak mencapai 100% disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Penilaian objek PBB-Perkotaan dan Perdesaan, bertujuan untuk mengukur nilai objek pajak sebagai dasar penetapan NJOP. Sasarannya adalah Potensi Lokasi PBB dan BPHTB, dengan jumlah dana Rp. 405.250.000.00 realisasi Rp. 403.183.000.00 atau 99,49 % sisa 2.067.000.00, Serapan anggaran tidak mencapai 100% disebabkan sisa transportasi dan akomodasi Rp. 200.000, dikarenakan anggaran yang digunakan disesuaikan dengan peserta yang hadir saat kegiatan berlangsung, kemudian sisa dari kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah disebabkan sisa dari pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Pemutahiran Data Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan, bertujuan untuk melakukan validasi data Retribusi dan lain-lain pendapatan. Sasarannya adalah Para Wajib Retribusi, dengan jumlah dana sebesar Rp. 81.311.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.311.500,- atau 100%.
  - Pengawasan lapangan spanduk dan reklame se-kabupaten Banggai, bertujuan untuk pengawasan pajak reklame. Sasarannya adalah wajib pajak reklame, dengan jumlah dana Rp. 40.835.000.00 realisasi Rp. 39.935.000.00 atau 97,80 %, sisa 900.000.00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah
-

- 
- ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
- Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun N+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N-1 dan Tahun N, yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi terhadap target pendapatan asli daerah tahun berkenaan dan tahun sebelumnya serta proyeksi tahun berikutnya, dengan jumlah dana Rp. 2.637.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.637.000,- atau 100%.
  - Pemutahiran Data dan Penetapan PBB, bertujuan untuk validasi penetapan nilai dan penagihan PBB. Sasarannya adalah Wajib Pajak, dengan jumlah dana sebesar Rp. 68.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.625.000,- atau 100%.
  - Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT Kelurahan/Desa, bertujuan untuk penyerahan SPPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Sasarannya adalah wajib pajak PBB di semua kecamatan, dengan jumlah dana Rp. 435.476.000.00 realisasi Rp. 431.441.000.00 atau 99,07 % sisa 4.035.000.00, yaitu sisa anggaran belanja transportasi dan akomodasi Rp. 1.800.000 dikarenakan anggaran yang digunakan disesuaikan dengan peserta yang ada saat kegiatan berlangsung. Sedangkan sisa anggaran belanja Rp. 2.095.000 dikarenakan pembayaran belanja cetak disesuaikan dengan harga penawaran serta Rp. 140.000 sisa dari perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PBB, bertujuan untuk menggali potensi sumber PBB. Sasarannya adalah Wajib Pajak PBB di semua Kecamatan, dengan jumlah dana 83.510.000.00 realisasi Rp. 83.367.000.00 atau 99,83 % sisa 143.000.00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah
-

- 
- ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
- Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB. Sasarannya Wajib Pajak PBB di semua Kecamatan, dengan jumlah dana Rp 36.670.000.00,- terealisasi Rp. 19.964.000.00 atau 54.44 %, sisa 16.706.000,-. Serapan anggaran tidak mencapai 100% disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Monitoring dan pengawasan penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan, bertujuan untuk pengawasan dan evaluasi capaian target dan realisasi Retribusi. Sasarannya adalah semua OPD teknis pengelola Retribusi, dengan jumlah dana Rp184.986.250,- dan terealisasi Rp. 152.586.200,- atau 82,49 %, sisa 32.400.000,- dari belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Rapat koordinasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan, bertujuan untuk koordinasi evaluasi penerimaan retribusi. Sasarannya adalah OPD teknis Pengelola Retribusi, dengan jumlah dana Rp 8.000.000.00 realisasi Rp. 7.194.000.00 atau 89,93 % sisa 806.000.00, dari penggandaan dan penjilidan yang tidak digunakan sehingga anggaran tidak terserap dengan maksimal.
  - Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan, bertujuan untuk menyusun dokumen laporan penerimaan retribusi. Sasarannya adalah Laporan Realisasi Retribusi dari OPD Teknis Pengelola Retribusi, dengan jumlah dana Rp. 2.345.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.345.000,- atau 100%.
-

- 
- Koordinasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah, bertujuan untuk penyelesaian masalah dan keberatan wajib retribusi. Sasarannya adalah wajib retribusi, dengan jumlah dana Rp 25.761.800,00 terealisasi Rp. 25.461.800,00 atau 99,84 % sisa 300.000,00. Serapan anggaran tidak mencapai 100% disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Sosialisasi Penyelesaian Retribusi Daerah, bertujuan untuk menyosialisasikan persoalan dan kendala dalam penagihan Retribusi Daerah. Sasarannya adalah OPD Teknis pengelola Retribusi, dengan jumlah dana sebesar Rp. 111.043.000, dan terealisasi sebesar Rp. 111.043.000,- atau 100%.
  - Koordinasi dan optimalisasi dana transfer/perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, bertujuan untuk pengawasan optimalisasi dana transfer/perimbangan pusat dan daerah. Sasarannya adalah Dana bagi hasil pusat dan daerah, dengan jumlah dana Rp 194.602.300,00 realisasi Rp. 132.446.165,00 atau 68,06 % sisa 62.156.136,00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain, bertujuan untuk menyusun dokumen laporan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah. Sasarannya adalah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, dengan jumlah dana Rp. 11.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.440.000,- atau 100%.
  - Koordinasi Bagi hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, bertujuan untuk evaluasi dalam memaksimalkan dana bagi hasil Minyak dan Gas. Sasarannya adalah Dana Bagi Hasil Minyak dan
-



- 
- Gas, dengan jumlah dana Rp 96.483.600,00, terealisasi Rp. 80.972.600,00 atau 83.92 % sisa 15.511.000,00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
- Monitoring, evaluasi dan pengawasan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain, bertujuan untuk pengawasan dan evaluasi pembagian dana perimbangan. Sasarannya adalah dana perimbangan pusat, dengan jumlah dana sebesar Rp 97.679.800,00 terealisasi Rp. 76.344.800,00 atau 78.16 % sisa 21.335.000.00 disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Pendataan potensi bagi hasil pusat dan provinsi, bertujuan untuk menyusun dokumen data potensi dana bagi hasil pusat dan daerah. Sasarannya adalah Dana Bagi Hasil Pusat dan Propinsi, dengan jumlah dana Rp 72.073.500,00 terealisasi Rp. 71.568.500,00 atau 99,64 % sisa 505.000.00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Monitoring dan pengendalian PAD, bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian target dan capaian realisasi Pajak Daerah. Sasarannya adalah 8 Jenis Pajak Daerah, dengan jumlah dana Rp 52.027.000,00 terealisasi Rp. 40.619.100,00 atau 78,07 % sisa 11.407.900,00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
-

- 
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan keberatan penagihan pajak daerah. Sasarannya adalah wajib pajak daerah, dengan jumlah dana Rp. 3.325.000,- terealisasi sebesar 3.325.000,- atau 100%.

i. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memaksimalkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Sasarannya adalah 10 Jenis Pajak. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 62.627.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.322.000,00 atau 99,51 %, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan ;

- Pembinaan Petugas Pemungut PAD-PBB, KUPT, Petugas Pemungut, bertujuan untuk pembinaan Sumber Daya Manusia Petugas Pemungut dalam rangka memaksimalkan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Sasarannya adalah Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi di semua kecamatan, dengan jumlah dana Rp 35.927.000,00 terealisasi Rp. 35.883.000,00 atau 99,88 % sisa 44.000,00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar *at cost*.
  - Monitoring dan Pengendalian PBB, bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian realisasi pendapatan yang Sumber dari PBB. Sasarannya adalah PBB dan BPHTB, dengan jumlah dana Rp 26.700.000,00 terealisasi Rp. 26.439.000,00 atau 99,02 % sisa 261.000,00, disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menggunakan standar Secara umum Badan Pendapatan Daerah telah mampu memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada institusi lingkup pemerintah daerah. Hal ini tercermin dengan dicapainya Rencana Kerja Tahun 2017 Dari 1 (Satu)
-

---

sasaran Strategis dan 2 ( Dua ) Indikator Kinerja Utama dibidang pendapatan, dengan 8 (Delapan) program yang diuraikan ke dalam 52 (Lima Puluh Dua) kegiatan dan telah disediakan anggaran untuk melaksanakan semua aktifitas program dan kegiatan dibidang pendapatan.

Dalam proses penyusunan Renja-SKPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat outcome dan output.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.**

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

---

---

Adapun analisis Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yaitu Penyediaan Dokumen Perencanaan Renstra OPD yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah sudah berjalan baik, karena Renstra OPD sudah memuat Visi Misi OPD, Tujuan, Strategi Kebijakan serta Program dan kegiatan dimana merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai Tugas dan Fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.**

#### **2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur**

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
  2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah -langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Badan Pendapatan harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
  3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub
-

---

bidang di setiap unit organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai;

4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

### **2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD**

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Badan Pendapatan baik oleh internal Badan Pendapatan Daerah maupun oleh OPD Pemungut PAD terkait;
  2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
  3. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Dinas Pendapatan secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
  4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
-

- 
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pendapatan dengan SKPD Pengelola PAD lain;
  6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
  7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019.**

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

---

---

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Badan Pendapatan untuk bisa mencapai target PAD yang telah ditetapkan yaitu;

1. Kurang Optimalnya Penerimaan Pajak daerah serta Data pajak yang disampaikan wajib pajak belum akurat ( Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir ).
  2. Belum Maksimalnya pelayanan terhadap wajib pajak
  3. Belum Maksimalnya Data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah
  4. Pengembangan sistim informasi data base yang akurat belum memadai;
  5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
  6. Objek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya.
  7. Kurangnya peningkatan pengawasan objek pendapatan asli daerah dengan menggunakan kontrol dan pelaksanaan infeksi lapangan.
  8. Adanya perda yang mengatur sanksi/hukuman wajib pajak bagi yang melanggar tidak diindahkan.
  9. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.
-

---

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan Kerja awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Banggai.

---



---

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019.**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Adapun Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dimana tujuan tersebut di jabarkan dalam misi 1 yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa yang berkaitan dengan tujuan dari Kepala Daerah Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan melayani.

Tujuan jangka jangka pendek (satu tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Memperhatikan kondisi dan perkembangan Pajak Daerah, Perekonomian dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai,

#### **2. Sasaran**

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai merupakan bagian integral Pemerintah Kabupaten Banggai yang kemudian dalam proses strategiknya mengkoordinir seluruh sumber - sumber pendapatan yaitu meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian untuk mencapai realisasi pendapatan di dukung dengan adanya indicator sasaran dengan meningkatkan persentase peningkatan pendapatan daerah.

---

---

### 3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan OPD.

#### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

#### b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  3. Pengadaan Peralatan gedung Kantor
  4. Pengadaan Meubelair
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
-

- 
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
- c. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS**
1. Pemulangan Pegawai Yang pensiun
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  4. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
  5. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
  6. Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah
- g. Program Pengembangan Sistem Informasi / Data**
1. Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base
  2. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
  3. Pemutakhiran Data Kepegawaian
- h. Program Pengembangan Sistem Informasi / Data**
1. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
-

---

2. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**i. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
  2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah-Pajak Daerah
  3. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
  4. Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah
  5. Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah
  6. Pemutakhiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Kelurahan/Desa
  7. Penagihan dan Uji Petik PBB dan BPHTB
  8. Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 Serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB
  9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PBB dan BPHTB
  10. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Serta Bimbingan Petugas Pemungut PAD-PBB dan KUPT se-Kabupaten Banggai
  11. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
  12. Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-lain Yang Sah
  13. Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah
  14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah
  15. Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah
-

- 
16. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah
  17. Pemutakhiran Data dan Pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah
  18. Forum Komunikasi Badan Pendapatan Daerah
-

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program dan kegiatan yang disusun ini membuat berbagai macam kebijakan yang tersusun secara terinci dan sikron dengan fungsi organisasi serta mempertimbangan sumber daya yang telah ditetapkan.

Di dalam program dan kegiatan tersebut terdapat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan.

Indikator kinerja ini bisa sebagai alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

---

---

## A. Rencana Program dan Kegiatan

### a. Program

Dalam rangka mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun indikator program tahun 2016-2021. Indikator program tersebut termuat dalam rencana strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila mempunyai satuan pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi atau capaian yang mudah terukur. Dalam pembuatan satuan pengukuran perlu memperhatikan *output* dan *outcome* serta *impac* dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai masuk dalam Misi ke 1 RPJMD Kabupaten Banggai yaitu : *Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa.*

Berdasarkan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menetapkan 9 (sembilan) program SKPD yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok program yaitu program rutin/penunjang operasional dan program prioritas. Selengkapnya program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

#### a. Program rutin/penunjang operasional, terdiri dari program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS
  5. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
  6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-

---

7. Program Pengembangan Informasi/Data

8. Program Perencanaan Umum

b. Program prioritas, terdiri dari program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Kegiatan

Untuk merealisasikan program yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang terarah dan terorganisir dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan kegiatan merupakan cara pemanfaatan sumber daya guna pencapaian tujuan baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berorientasi hasil, sehingga hasil kegiatan dapat terukur secara rasional, efisien dalam pendanaan serta pencapaian tujuan secara efektif.

Selang tahun 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat/bidang-bidang dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Adapun kegiatan yang direncanakan ini mengacu dan menunjang program-program yang telah ditetapkan dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kegiatan pada Program Rutin/Penunjang Operasional.

Kegiatan yang menunjang Program Rutin/Penunjang Operasional dapat bersifat rutin operasional dengan waktu pelaksanaannya selama tahun Renstra. Dalam kegiatan ini lebih bersifat mendukung pelaksanaan administrasi rutin yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada tiap SKPD dan juga sebagai penunjang operasional perkantoran. Indikator kinerja dan kegiatan ini lebih

---



---

kepada pengadaan barang dan jasa yang bersifat sebagai pendukung operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

2) Kegiatan pada Program Prioritas

Kegiatan yang menunjang Program Prioritas merupakan kegiatan berfokus pada pencapaian visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan pada kondisi lingkungan internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Adapun Program dan kegiatan Prioritas dan Program dan kegiatan rutin/penunjang operasional beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada KUA PPAS Tahun 2020

#### **B. Pendanaan Indikatif**

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, perlu ditunjang dengan ketersediaan dana yang cukup memadai. Dengan ketersediaan dana yang cukup dan pada waktu yang tepat diharapkan dapat memperlancar jalannya program kegiatan tersebut. Ketersediaan dana tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banggai maupun dari sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun rencana pendanaan pada setiap program dan kegiatan baik untuk program rutin / penunjang operasional maupun prioritas dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun kedepan. Adapun rincian pendanaan (pagu indikatif) program rutin / program penunjang operasional dan program prioritas juga dapat dilihat pada KUA PPAS Tahun 2020

---

---

## BAB V PENUTUP

---

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2019. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019.

Demikian rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2019 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama.

Hasil kinerja Renja SKPD tahun 2019 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai kedepan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.

---



